

**SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
M. JUSUF KALLA**

**PADA PEMBUKAAN  
RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEPEGAWAIAN 2017**

**Jakarta, 10 Mei 2017**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Selamat pagi

*Salam sejahtera untuk kita semua*

Yang saya hormati

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Kepala Badan Kepegawaian Negara,

Hadirin-hadirat.

Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas kesempatan kita hadir di sini untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2017.

Setiap langkah kita tentu mempunyai tujuan. Tujuan utamanya ialah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa secara adil. Karena hari ini yang berkumpul para aparatur sipil negara, tentu maksudnya adalah bagaimana kita semua di sini meningkatkan upaya kita dalam melayani masyarakat sehingga masyarakat atau bangsa Indonesia bisa maju dengan layanan-layanan yang baik dan sistematis sesuai dengan program yang kita setuju kepada seluruh bangsa ini. Oleh karena itu, inti pokok kita ialah meningkatkan pelayanan dengan meningkatkan kemampuan Saudara-saudara semua. Yang kita harapkan tentu ialah meningkatnya pelayanan birokrasi pegawai aparatur negara kepada seluruh masyarakat kita.

Berbagai macam upaya telah kita upayakan untuk meningkatkan hal tersebut, baik berupa sistem, fasilitas, infrastruktur, ataupun upaya mengadministrasikan aparatur negara yang begitu besar di bangsa ini. Pada dewasa ini, jumlah aparatur negara atau pegawai negeri sipil, masih selalu kita sampaikan seperti itu, kurang lebih 4,5 juta orang yang mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat secara umum. Dalam rangka memberikan pelayanan itu, telah berkembang begitu banyak cara dan teknologi yang mendukung, di samping cara untuk melayani, juga cara untuk memberdayakan aparatur negara itu sendiri.

Berbagai upaya dilakukan, antara lain di mana-mana sekarang sudah populer *smart city*, *e-government* dan telah menjadi bagian sehari-hari dari pekerjaan kita semua. Tidak mungkin kita kembali ke masa lalu dengan penduduk yang makin bertambah tanpa layanan yang baik, layanan *online*, *real time*. Semua menjadi bagian sehari-hari dari masyarakat kita. Memang layanan dan sistem *e-government*, *online system*, ataupun *smart city*, *smart town*, *smart province* mempunyai suatu hal yang positif, tetapi juga mempunyai efek-efek yang perlu kita perhatikan.

Hal yang pertama tentu pelayanan menjadi lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih singkat. Seseorang yang ingin mengurus izin bisa lewat *online*, bisa bertemu dengan pejabatnya, mendapat informasi tidak perlu membuat selebaran ataupun iklan, tetapi cukup dengan menggunakan *online system* atau yang lain. Akibat lainnya adalah semua pegawai kita, kantor-kantor pemerintah harus memperbaharui sistemnya. Dahulu, mesin ketik dan juga komputer sebagian besar hanya dipakai untuk mesin ketik atau main *game* kalau ada waktu. Namun, sekarang ini betul-betul harus bermanfaat untuk melayani masyarakat. Itulah makna dari potensi ini.

Kemarin kita juga sudah bicarakan kendala-kendalanya. Sekarang ini banyak provinsi, kota, dan kementerian mempunyai sistem tersendiri yang tidak terkoneksi dengan instansi pemerintah lainnya. Oleh karena itu, kita telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Aparatur Sipil Negara untuk membuat sistem nasional yang dapat saling berhubungan. Dengan demikian, apabila ada sistem teknologi informasi yang baik, bupati-bupati dapat berhubungan dengan kabupaten lain dan dengan provinsinya dan gubernur dapat menilai dan mengevaluasi apa yang telah dijalankan.

Begitu juga, kementerian. Semua kementerian mempunyai sistem yang berbeda-beda sehingga tidak mudah untuk mengoordinasikan sistem yang ada. Dari semua itu, pemerintah akan mengupayakan adanya suatu sistem nasional teknologi informasi, yang kita sebut sekarang sebagai zaman digital, dan menjadi bagian dari pada upaya kita semua.

Tentu ada juga efek lain di daerah. Pegawai administrasi pasti harus berkurang, bagian arsip tentu tidak lagi banyak dibutuhkan, operator telepon hampir tidak ada lagi dewasa ini karena semua sudah berhubungan langsung melalui *handphone*-nya. Begitu juga, jabatan-jabatan lain. Oleh karena itu, apabila kita ingin menjalankan digitalisasi ke seluruh sistem pemerintahan, tentu juga harus ada efisiensi nasional. Namun, yang sangat penting ialah peningkatan mutu pegawai itu sendiri. Tanpa pemahaman/mutu dari pegawai itu sendiri, sistem digital tersebut juga hanya akan menjadi sekadar alat yang dibeli, tetapi masyarakat tetap harus menghadap, orang harus menunggu arsip-arsip. Sistem digital akan menjadikan semuanya lebih baik apabila dijalankan dengan baik dan juga dipenuhi dengan kejujuran karena ada juga adagium di teknologi informasi “sampah masuk sampah keluar”, kalau informasi salah dimasukkan, maka keluar juga informasi salah walaupun bisa ditolak kalau sistemnya baik. Semua itu menjadi bagian dari sistem kita yang harus dilaksanakan.

Kita juga menyadari bahwa suatu sistem kepegawaian yang mengharuskan aparatur meningkatkan kemampuannya juga harus disertai dengan penghasilan yang lebih baik. Oleh karena itu, ada tunjangan kinerja dan sebagainya. Mungkin juga nanti ada sistem pensiun yang lebih baik. Zaman dulu orang bergembira kalau mau pensiun, sekarang ini orang merasa susah kalau mau pensiun akibat perbedaan penghasilan. Hal tersebut juga menjadi bagian perhatian kita, tetapi ini harus dikompensasi dengan pengeluaran yang lebih kecil secara umum. Apabila sistem digital, pastilah kantor tidak perlu sebesar sekarang.

Oleh karena itu, dari sekarang ada dua hal yang dimoratorium. Pertama, moratorium pembangunan kantor-kantor pemerintah tanpa seizin Presiden. Izin Presiden pasti alangkah susah-susah apabila hanya untuk kantor administrasi karena dengan sistem digital, semuanya akan lebih efisien. Kedua, kita juga melakukan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil, terkecuali guru, tenaga kesehatan, riset, dan sebagainya karena kita tidak

membutuhkan lagi sistem administrasi yang rumit. Mungkin saja kemudian dilakukan perampingan, tidak perlu lagi ada eselon 1, 2, 3, dan 4 yang demikian panjang dan akhirnya urusan makin lambat karena semua ingin paraf. Kalau empat pejabat eselon paraf, butuh waktu sebulan baru sampai ke atas, apalagi untuk hal-hal yang penting, kadang-kadang perlu ongkos di masing-masing tingkat. Inilah hal yang harus kita perbaiki.

Sistem yang baik selalu menimbulkan hal positif, tetapi juga mempunyai efek yang harus diperbaiki. Kita semua tidak bisa memungkiri semua ini. Pada sistem, di mana pun guru yang mengajar dapat dikontrol, dia mengajar atau tidak, dengan sistem *handphone* saja, apakah dia hadir atau tidak. Begitu juga, pegawai. Anda bisa diketahui ke mana saja Anda pergi karena ke mana Anda pergi pasti *handphone* juga ikut. Tentu ada juga jalannya, tinggalkan *handphone* di meja sehingga tidak diketahui keberadaannya. Namun, kalau terlalu lama tidak bergerak-gerak, pasti di laci ini *handphone*. Ini semua mengindikasikan bahwa makin modern makin baik karena sistem teknologi informasi adalah suatu sistem yang tidak lagi dapat dihindari. Orang seumuran saya sudah *gaptek*, tetapi anak dan cucu, serta generasi Anda yang masih muda paham.

Oleh karena itu, moratorium jumlah pegawai juga harus kita ketahui, kita sadari sebagai akibat sistem yang baik ini dan karena biaya rutin makin tinggi. Biaya rutin tinggi artinya biaya pembangunan menurun. Nah, apabila semuanya melaju, sistem diperbaiki dan orang bertambah, habislah anggaran negara untuk membikin jalan, membikin rumah sakit, dan membikin industri. Oleh karena itu, semua secara bersamaan harus berjalan, naikan teknologi, pegawai *negative growth*, dan pembangunan kantor tidak diizinkan lagi untuk sampai saat sekarang ini. Ini dimaksudkan untuk mengefisienkan negara. Di daerah, banyak kantor bupati lebih baik daripada kantor gubernur. Kantor gubernur lebih baik daripada kantor menteri, kadang-kadang. Semua itu harus dilakukan agar negara ini dapat memberikan layanan yang lebih baik dan dapat memberikan hasil atau pembangunan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama karena itulah tujuan kita semua.

Oleh karena itu, peningkatan digital atau *e-government* di kalangan pemerintahan yang akan dibicarakan kali ini haruslah dijalankan karena apabila tidak, kita akan ketinggalan. Seperti zaman dahulu, orang pensiun, sudah berhenti menjadi pegawai, tetapi belum terima uang pensiunnya karena surat keputusan pensiun belum turun. Sekarang ini dengan sistem digital begitu usia sudah mencapai 58 tahun, langsung surat keputusan pensiunnya keluar dan langsung tercatat di PT Taspen untuk terima dana pensiun di situ. Sistem digital tersebut memperpendek dan diharuskan mempercepat proses semuanya. Nah, itu juga hal-hal yang harus diperbaiki.

Sekali lagi, esensi kepegawaian ialah melayani masyarakat karena itu bahasa Inggris-nya *public servant*, pelayan publik. Oleh karena itu, tanpa melayani yang baik, tentu kita tidak menjadi bagian dari sistem kepegawaian negara yang kita bicarakan ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih atas segala pengabdian selama ini dan saya mengucapkan terima kasih atas upaya perubahan yang lebih baik pada sistem kepegawaian kita. Saya juga mengharapkan pegawai negeri sipil kita atau aparatur sipil negara kita menjalankan tugas-tugas kita dengan baik. Kemarin kita sudah memutuskan, aparatur sipil negara berubah dari pegawai negeri sipil, tetapi untuk KORPRI, tetap KORPRI seperti itu supaya jangan berubah-ubah, begitu.

Itulah yang kita harapkan dan masyarakat tentu juga mengharapkan semua itu. Semoga kita semua diberikan hidayah Allah SWT untuk menjalankan tugas-tugas kita seterusnya.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*